

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional karena mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sektor ini terus dikembangkan sebagai salah satu penggerak pembangunan daerah melalui pemanfaatan potensi alam, budaya, dan sumber daya lokal yang dimiliki setiap wilayah (BPS, 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan pembangunan pariwisata nasional tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan pada penerapan prinsip keberlanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan (Kemenparekraf, 2023).

Pada tingkat global, konsep pariwisata berkelanjutan telah menjadi bagian penting dalam upaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan ini menempatkan sektor pariwisata sebagai instrumen yang tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, pengurangan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat lokal (UNWTO, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan destinasi wisata pada masa kini tidak lagi diukur semata-mata berdasarkan tingginya jumlah wisatawan yang datang, melainkan juga berdasarkan kualitas pengelolaan destinasi serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya (OECD, 2023).

Salah satu pendekatan yang dinilai mampu mewujudkan tujuan tersebut adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal sebagai landasan utama pengelolaan destinasi. Model pengembangan ini memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pengelolaan, hingga pengembangan kegiatan pariwisata sehingga manfaat yang diperoleh dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat (World Bank, 2023). Selain berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, pemanfaatan kearifan lokal juga berfungsi sebagai upaya mempertahankan identitas budaya sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui praktik-praktik tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun (Putri & Hidayat, 2024).

Salah satu destinasi yang memiliki karakteristik tersebut adalah Tomboan Ngawonggo yang berlokasi di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Destinasi ini memadukan potensi wisata alam, budaya, dan sejarah dalam satu kawasan yang dikelola secara aktif oleh masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pengelolaan yang diterapkan menonjolkan nilai gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas destinasi. Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan di kawasan ini masih memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana praktik pengelolaan yang telah dilakukan sesuai dengan indikator pariwisata berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena bertujuan menganalisis implementasi konsep pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Tomboan Ngawonggo. Analisis dilakukan dengan mengacu pada indikator resmi pariwisata berkelanjutan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat penerapan prinsip

keberlanjutan, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang telah berjalan dengan baik maupun aspek yang masih memerlukan penguatan dalam pengelolaan destinasi wisata.

Peran sektor pariwisata tidak hanya terbatas sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan daya saing suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus menyusun berbagai kebijakan yang diarahkan pada pengembangan pariwisata yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya. Seiring berkembangnya kesadaran masyarakat internasional terhadap dampak aktivitas pariwisata, paradigma pembangunan pariwisata pun mengalami perubahan, yaitu dari konsep pariwisata massal menuju pariwisata yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pergeseran tersebut didorong oleh komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan serta meningkatnya kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dengan pelestarian sumber daya alam dan budaya lokal (UNWTO, 2023).

Perubahan paradigma tersebut juga dipengaruhi oleh semakin besarnya perhatian terhadap berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan apabila kegiatan pariwisata tidak dikelola secara berkelanjutan. Aktivitas wisata yang berkembang tanpa perencanaan yang baik berpotensi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, berkurangnya keaslian budaya lokal, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, hingga meningkatnya kerentanan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata. Oleh sebab itu, berbagai organisasi internasional menekankan pentingnya penerapan tata kelola destinasi yang bertanggung jawab, inklusif, dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama agar manfaat pembangunan pariwisata dapat dirasakan secara merata tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan maupun budaya setempat (OECD, 2024).

Konsep pariwisata berkelanjutan pada dasarnya merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan secara seimbang. Pendekatan ini bertujuan agar aktivitas pariwisata tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menjaga keberlangsungan sumber daya alam, melestarikan warisan budaya, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dalam jangka panjang (UNWTO, 2023). Dengan demikian, keberhasilan suatu destinasi tidak lagi hanya dinilai berdasarkan peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga dari kemampuan pengelolaannya dalam menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (Kemenparekraf, 2024).

Di Indonesia, penerapan konsep pariwisata berkelanjutan telah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sektor pariwisata. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendorong transformasi menuju pariwisata yang berkualitas melalui berbagai kebijakan, program, serta pedoman yang berorientasi pada keberlanjutan (Kemenparekraf, 2023). Salah satu regulasi yang menjadi landasan penting adalah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Regulasi tersebut menetapkan empat pilar utama sebagai dasar pengembangan destinasi, yaitu pengelolaan keberlanjutan, keberlanjutan sosial-ekonomi, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Keempat pilar tersebut menjadi acuan dalam mengevaluasi sejauh mana suatu destinasi telah menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan secara menyeluruh.

Selain melalui regulasi, pemerintah juga memperkuat implementasi konsep tersebut dengan menghadirkan berbagai program strategis, seperti Blue, Green, Circular, and Engaging (BGCE) serta Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA). Program-program tersebut

merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pengelolaan destinasi wisata yang lebih inovatif, ramah lingkungan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Berbagai destinasi di Indonesia mulai menerapkan praktik efisiensi energi, pengelolaan limbah, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, hingga pengembangan produk wisata berbasis budaya lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan (Kemenparekraf, 2023).

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menyusun indikator pariwisata berkelanjutan yang menjadi pedoman dalam menilai kualitas pengelolaan destinasi wisata. Indikator tersebut mencakup tata kelola destinasi, pelestarian budaya, pemerataan manfaat ekonomi, konservasi sumber daya alam, serta pengelolaan limbah dan energi. Melalui indikator tersebut, keberhasilan suatu destinasi tidak hanya diukur dari tingginya tingkat kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi pariwisata yang beragam, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, hingga wisata berbasis masyarakat. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antara berbagai destinasi yang berkembang, Tomboan Ngawonggo menjadi salah satu daya tarik wisata yang memiliki karakteristik berbeda karena menggabungkan unsur sejarah, budaya, alam, serta nilai-nilai kearifan lokal dalam satu kawasan wisata yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat.

Tomboan Ngawonggo berlokasi di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Kawasan ini berkembang melalui inisiatif masyarakat yang berupaya memanfaatkan potensi lokal tanpa menghilangkan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pengelolaan wisata dilakukan secara partisipatif melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan mengedepankan semangat gotong royong, kebersamaan, serta kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Pendekatan tersebut menjadikan masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam setiap proses pengembangan destinasi wisata.

Salah satu keunikan Tomboan Ngawonggo terletak pada kemampuannya memadukan wisata alam dengan wisata sejarah dan budaya. Keberadaan Situs Petirtaan Ngawonggo sebagai peninggalan sejarah menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat nilai edukasi destinasi tersebut. Selain itu, berbagai tradisi lokal, aktivitas budaya masyarakat, serta penyajian kuliner tradisional berbahan dasar tanaman herbal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman wisata yang ditawarkan kepada pengunjung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan destinasi tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya dan nilai-nilai lokal yang menjadi identitas masyarakat.

Dalam aspek lingkungan, pengelola Tomboan Ngawonggo telah menerapkan berbagai praktik yang mencerminkan prinsip pariwisata berkelanjutan. Salah satu bentuk penerapannya adalah membatasi penggunaan plastik sekali pakai di kawasan wisata sebagai upaya mengurangi timbulan sampah. Pengunjung didorong untuk menggunakan wadah yang lebih ramah lingkungan sehingga volume limbah plastik dapat ditekan. Selain itu, sisa makanan yang masih layak tidak langsung dibuang, tetapi dimanfaatkan sebagai pakan ternak milik masyarakat

sekitar. Praktik tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip ekonomi sirkular yang mampu meminimalkan limbah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Meskipun memiliki berbagai potensi, pengelolaan Tomboan Ngawonggo masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan secara optimal. Beberapa di antaranya berkaitan dengan keterbatasan pendanaan untuk pengembangan fasilitas, penguatan kelembagaan organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dokumentasi kegiatan, serta perluasan promosi destinasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian karena keberhasilan pengelolaan destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh potensi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan secara konsisten.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi konsep pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Tomboan Ngawonggo. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai sejauh mana prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan telah diterapkan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang masih menjadi kendala dalam penerapan konsep tersebut sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi bagi pengelola, pemerintah, dan pihak terkait dalam mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan.

Pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep pariwisata berkelanjutan pada destinasi wisata berbasis masyarakat. Meskipun berbagai kebijakan nasional telah memberikan pedoman

mengenai pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, implementasi di tingkat lokal sering kali menghadapi kondisi dan karakteristik yang berbeda pada setiap daerah. Perbedaan potensi sumber daya, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta bentuk kearifan lokal menyebabkan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan tidak selalu berjalan dengan hasil yang sama. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan sehingga implementasi kebijakan dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Tomboan Ngawonggo dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus kajian mengenai pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Destinasi ini berkembang melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola potensi wisata dengan tetap mempertahankan nilai budaya, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Keunikan tersebut menjadikan Tomboan Ngawonggo sebagai objek penelitian yang relevan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip keberlanjutan diterapkan dalam praktik pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas.

Di sisi lain, masih terdapat berbagai aspek yang memerlukan perhatian agar pengelolaan destinasi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Penguatan kelembagaan pengelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem promosi, penyediaan fasilitas pendukung, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan pengembangan destinasi wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan potensi alam dan budaya, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang terencana, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan sebagai acuan utama dalam menganalisis implementasi pariwisata berkelanjutan di Tomboan Ngawonggo. Regulasi tersebut memuat empat pilar utama, yaitu pengelolaan keberlanjutan, keberlanjutan sosial budaya, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Keempat pilar tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi tingkat penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan sekaligus mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pengelola bersama masyarakat.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi konsep pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Tomboan Ngawonggo. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah mengenai pariwisata berkelanjutan, tetapi juga menjadi bahan masukan bagi pengelola destinasi, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait dalam menyusun strategi pengembangan wisata yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Dengan demikian, pengembangan destinasi wisata diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat pada masa kini maupun generasi yang akan datang.

Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal di Tomboan Ngawonggo, Malang, Jawa Timur." Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai implementasi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

Implementasi pariwisata berkelanjutan di daya tarik wisata Tomboan Ngawonggo berdasarkan 4 pilar utama menurut indikator Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Tomboan Ngawonggo menurut Kemenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang mengatur pedoman dan standar pengembangan daya tarik pariwisata berkelanjutan agar selaras secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. (Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021, Halaman 12-48)

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- A. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian teori pariwisata berkelanjutan, khususnya dalam konteks implementasinya di tingkat desa wisata di Indonesia.
- B. Memperkuat pemahaman terhadap konsep pariwisata berkelanjutan berbasis 4 pilar utama (Pengelolaan Keberlanjutan, Keberlanjutan Sosial Budaya, Keberlanjutan Ekonomi, dan Keberlanjutan Lingkungan), sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- C. Referensi ilmiah bagi peneliti dan akademisi dalam mengkaji efektivitas penerapan konsep pariwisata berkelanjutan di daya tarik wisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*).
- D. Mendorong pengembangan model evaluasi atau kerangka analisis yang dapat digunakan dalam studi-studi lanjutan terkait keberlanjutan pariwisata di wilayah lain.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- A. Memberikan rekomendasi konkret bagi pengelola Desa Wisata Tomboan Ngawonggo dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan berdasarkan evaluasi terhadap 4 pilar utama (Pengelolaan Keberlanjutan, Keberlanjutan Sosial Budaya, Keberlanjutan Ekonomi, dan Keberlanjutan Lingkungan).
- B. Membantu pelaku wisata lokal (seperti masyarakat, UMKM, dan komunitas desa) memahami sejauh mana kegiatan pariwisata yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
- C. Dasar perbaikan strategi pengelolaan desa wisata agar lebih ramah lingkungan, inklusif secara sosial, dan berkelanjutan secara ekonomi.